



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima Online

Kamis, 31 Agustus 2017

Ditreskrim Ambil Alih Kasus Rumah Murah

Ambon - Direktorat Reserse dan Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Maluku telah mengambilalih penanganan kasus proyek pembangunan 1000 unit rumah murah bantuan pemerintah pusat di Kota Ambon.

Awalnya perkara ini diusut Tim Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku, namun setelah dipelajari bukan merupakan tindak pidana khusus sehingga dialihkan penanganannya ke pidana umum (pidum).

Wadirkrimsus Polda Maluku, AKBP Harold Wilson Huwae yang dikonfirmasi melalui telepon selulernya Rabu (30/8) menjelaskan, perkara itu masuk pada pidana umum sehingga jika ada korban yang melaporkan diarahkan ke Ditreskrim Polda Maluku. "Itu masuk pidana umum, bukan khusus, Jadi kalau ada korban yang mau melapor diserahkan kepada krimum," ujar Huwae singkat.

Mantan Kapolres Ambon dan Pulau-pulau Lease ini enggan berkomentar banyak karena penanganannya tidak lagi oleh Ditreskrimsus. Sementara itu, Direskrim Polda Maluku, Kombes Gupuh Setiyono yang dikonfirmasi juga belum mau berkomentar.

Ia mengaku belum mengupdate kasusnya. Namun jika sudah jalan akan disampaikan. "Saya belum dapat updatenya. Mohon waktu. Akan saya sampaikan," janjinya singkat.

Polda Maluku rupanya tengah membidik proyek ini. Warga Kota Ambon nampaknya, mulai resah dengan adanya program pemerintah yang memudahkan masyarakat mendapatkan rumah, dengan harga yang murah dan terjangkau itu.

Program rumah murah di Kota Ambon terus bermasalah. Belum selesai permasalahan antara Pemkot Ambon dengan PT.Lestari Pembangunan Jaya (LPJ) pimpinan Betty Pattikayhatu, kini muncul perusahaan lain yang mengklaim sudah mengantongi ijin untuk membangun proyek bantuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tersebut.

Alhasil Ditreskrimsus Polda Maluku mulai melakukan pengumpulan data-data terkait permasalahan tersebut. Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku, Gerald Wattimena yang didampingi rekannya Joseph Latuheru menegaskan, proyek rumah murah saat ini belum memiliki kejelasan lantaran terkendala status lahan.

"Status lahannya sampai sekarang belum diketahui kejelasannya dan masyarakat pun ada yang mulai resah, sehingga kita masih mengumpulkan data-datanya dulu," kata Wattimena kepada wartawan usai memberikan materi pada kegiatan Journalist Class 2017, di Maluku Resort, Jumat (25/8).

Meski belum dilanjutkan ke tahap penyelidikan, namun Wattimena menjamin pihaknya masih terus melakukan tahapan pengumpulan data. "Memang belum sampai tahap penyelidikan, tetapi masyarakat kan ada yang sudah mulai resah. Dia mau membangun



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima Online

rumah tapi lahannya dimana. Kita dengar yang bersangkutan masih berurusan dengan pihak bank untuk modal. Kita masih mengecek, katanya tanahnya disini tapi kok pembebasan lahannya belum ada,” jelas Wattimena.

Sebelumnya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perkotaan (PRKP) Kota Ambon memastikan akan melakukan survei terhadap setiap lokasi yang akan dibangun rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memastikan apakah sesuai dengan rencana tata ruang dan tata wilayah atau tidak.

Untuk itu, sampai dengan saat ini, pemkot belum memberikan ijin kepada setiap pengembang yang akan membangun rumah murah di kota ini, selain karena banyak persoalan yang belum diselesaikan oleh para pengembang, persoalan krusial lainnya adalah masalah lahan serta persoalan tata ruang dan wilayah yang menjadi kunci dikeluarkannya ijin. “Pembangunan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tetap di dukung pemkot, asalkan tidak bertabrakan dengan aturan,” tandas Kadis PRKP Kota Ambon Denny Lilpory, kepada Siwalima di Balai Kota, Selasa (22/8).

Menurutnya, setelah ijin pemanfaatan lahan dikeluarkan, sudah menjadi tugas pemkot untuk melakukan survei lokasi. Survei ini dilakukan untuk mengetahui apakah lokasi yang akan dibangun perumahan ini sesuai dengan tata ruang dan tata wilayah atau tidak, apakah lahannya bermasalah atau tidak, ataukah lokasinya berada di daerah hutan konservasi atau lindung dan sebagainya.

Tidak hanya itu, ketika membangun rumah, pihak pengembang juga harus memperhatikan air bersih karena dari tiga lokasi yang saat ini akan dibangun perumahan itu air bersihnya sangat sulit diperoleh. “Banyak hal yang menjadi pertimbangan, asalkan tidak bertentangan dengan aturan pasti bisa dikeluarkan ijinnya,” jelasnya. Ia mengaku, selama semua proses itu sesuai aturan, maka ijin dengan mudah dikeluarkan. Dalam lokasi perumahan yang dibangun juga, pengembang harus menyediakan ruang terbuka hijau 20 persen dari luasan lahan yang ada.

“Ini juga menjadi syarat yang harus dipenuhi bukan saja semata-mata rumah,” tukasnya. Diberitakan sebelumnya proyek rumah murah di Kota Ambon terus bermasalah.

Belum kelar permasalahan antara Pemkot Ambon dengan PT.Lestari Pembangunan Jaya (LPJ) pimpinan Betty Pattikayhatu, kini muncul perusahaan lain yang mengklaim sudah mengantongi ijin untuk membangun proyek bantuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu. Meski begitu, Pemkot beralasan sampai saat ini proyek pembangunan 1000 unit rumah murah seperti di Tawiri (PT LPJ), Gunung Nona (PT.Tagalaya Regensi) dan Benteng Karang (PT.Bastem Kanna) belum memiliki ijin apapun. **(S-27)**

http://www.siwalimanews.com/post/ditreskrimum_ambil_alih_kasus_rumah_murah